

Penggunaan Isu Demokrasi Melalui Website oleh Kelompok Radikal dalam Melawan Pemerintah Indonesia

Democracy Issue Usage via Website by Radical Group in Opposing Indonesian Government

Karman¹⁾, Djoko Waluyo²⁾

^{1,2}Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

^{1,2}Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110

karman@kominfo.go.id¹⁾, djok016@kominfo.go.id²⁾

Diterima: 15 Agustus 2018 || Revisi: 15 Oktober 2018 || Disetujui: 20 Oktober 2018

Abstrak – Artikel ini membahas masalah bagaimana kelompok radikal melakukan inklusi terhadap pemerintah Indonesia sebagai negara demokrasi, melalui praktik penggunaan bahasa di media online. Kelompok radikal yang dimaksud adalah Jamaah Ansharu Tauhid (JAT). Untuk menjawab masalah ini, kami mengumpulkan data berupa konten artikel dari halaman web www.ansharuttauhid.com. Kami mencari dengan menggunakan kata "demokrasi". Peneliti secara apriori menentukan konten mana saja yang mengandung representasi pemerintah Indonesia, dalam isu demokrasi. Kami menganalisisnya dengan model analisis representasi aktor sosial dan aksi sosial yang diperkenalkan oleh Theo Van Leeuwen. Kami menyimpulkan bahwa JAT menginklusi pemerintah sebagai *liyan* atau *outsider* dalam konteks agama. Pemerintah Indonesia berbeda dengan JAT dalam hal agama. JAT mendelegitimasi pemerintah Indonesia dengan teknik bahasa. Pemerintah disimbolkan sebagai *thoghut*, dihadirkan dalam teks dengan cara-cara negatif (dengan *pseudo title* yang negatif dan epitet). Sebaliknya, JAT menginklusi pelaku terorisme dengan cara honorifikasi. Inklusi dan delegitimasi pemerintah Indonesia sebagai negara demokratis ini bertolak dari agama sebagai sistem makna yang idiosinkratik dan bersifat radikal.

Kata Kunci: demokrasi, Jamaah Ansharu Tauhid, kelompok radikal, strategi inklusi

Abstract– This article dealt with the issue of how radical groups include Indonesian government as a democratic country, through the practice of language usage in online media. That radical group is Jamaah Ansharu Tauhid (JAT). We collect data from the web page (www.ansharuttauhid.com) with the word of 'democracy' in the proses of query. We determine contents containing government representation on democratic issue. We analysed the text with an analysis model of representation of social actors and social action as Theo VanLeeuwen introduced. We conclude that JAT include the Indonesian government as outsiders in the context of religion. The government is different from JAT in the context of religion. JAT delegitimized Indonesian government with some language techniques. JAT symbolized Indonesia government as "thoghut", and included it in the web contents negatively (e.g., by pseudo title, epithets, etc.). On the contrary, JAT appreciated terrorism perpetrators by harnessing honorification technique. The inclusion and delegitimacy of the Indonesian government depart from religion as an idiosyncratic system of meaning.

Keywords: democracy, inclusion strategy, Jamaah Ansharu Tauhid, radical group

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu parameternya ialah dengan penyelenggaraan pemilihan umum secara rutin. Negara dengan sistem demokrasi mewajibkan jabatan publik dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Setiap warga negara memiliki kesamaan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Mereka mendapatkan hak untuk berekspresi secara efektif, serta berhak membentuk dan mengikuti organisasi, termasuk organisasi politik (Gaffar, 1996, pp. 6, 7).

Sistem demokrasi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan

pandangan, mengontrol negara. Sistem demokrasi membatasi kekuasaan eksekutif atas dasar konstitusi, menjamin kebebasan untuk membentuk partai politik peserta pemilihan umum secara periodik yang bebas dan adil. Warga negara mempunyai kedaulatan di hadapan hukum, dan hak memilih dan dipilih (Dahl, Diamond dalam BAPPENAS and UNDP, 2016). Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, pemilihan kepala daerah tahun 2018, dan pemilihan presiden tahun 2019 nanti.

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan mekanisme untuk mewujudkan pemimpin demokratis,

yang akan menyelenggarakan kepemimpinan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Kepemimpinan itu sendiri adalah aktivitas mempersuasi seseorang dalam masyarakat (kelompok atau organisasi) untuk mencapai tujuan bersama atau perilaku yang diinginkan.

Pemimpin memiliki peran penting dalam perubahan budaya, sistem, dan menggerakkan sumber daya organisasi. Tujuan kepemimpinan dapat dicapai dengan cara memengaruhi, memfasilitasi usaha individu / kolektif, mempersuasi dan memberi contoh kepada anggota masyarakat, melakukan perubahan transformatif, mengartikulasikan dan mewujudkan visi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi (Harrison, 2018).

Kepemimpinan dalam konteks sistem demokrasi mendapat respon dari segmen masyarakat (umat Islam). Ini konsekuensi logis dari perbedaan respon mereka terhadap sistem dan nilai demokrasi itu sendiri (menerima atau menolak dengan ragam alasan). Hal ini memberikan implikasi berupa perbedaan dalam memersepsikan dan merepresentasikan produk demokrasi. Dalam konteks ini, produk demokrasi yang dimaksud adalah pemerintah Indonesia.

Respon umat Islam terhadap demokrasi, secara umum, dapat dibagi menjadi dua kelompok: menerima demokrasi dan menolak demokrasi (Haqqani, 2013, p. 7). Umat Islam yang menerima sistem demokrasi sering disebut kelompok Islam moderat atau kelompok substansialis. Sebaliknya, mereka yang menolak sistem demokrasi sering disebut dengan kelompok beragam konsep antara lain, Islam fundamentalis (Castells, 1997; Huntington, 1995), Islam skripturalis (Liddle, 1996), Islam revival (Esposito, 1988), Islam literal (Lestari, 2014).

Fundamentalisme, dalam literatur berbahasa Arab, dipadankan dengan kata, '*muta'ashibiin*', '*mutatharriifiin*'. Bahasa Melayu menggunakan kata '*puak pelampau*' atau orang-orang ekstrem dan menggunakan kata '*puak pengganas*' atau orang-orang kejam. Di masa orde baru, Islam fundamentalis disebut 'ekstrem-kanan'. Sementara itu, 'ekstrem-kiri' untuk kelompok berideologi sosialis-komunis (Mahendra, 1999).

Fenomena fundamentalisme ini merupakan fenomena mondial yang terjadi di semua agama, seperti Kristen, Yahudi, Islam, Buddha, Hindu, dan Konfusianisme (Amstrong, 2000). Penulis menggunakan kata radikal dalam makna yang dapat dipertukarkan dengan kata fundamentalisme.

Menurut Amstrong (2000), fundamentalis tidak memberikan peluang bagi paham demokrasi, pluralisme, toleransi beragama, upaya penjaga perdamaian, kebebasan bicara, sekularisme. Poin penting dari kelompok radikal adalah mereka merasa bahwa mereka tengah berjuang untuk melawan kekuatan-kekuatan yang mengancam nilai-nilai yang paling suci.

Radikalisme adalah cara kelompok melihat teks suci sebagai ketentuan yang berasal dari Tuhan dan bebas dari kesalahan, sesuatu yang mereka interpretasikan sendiri, sesuatu yang mereka agungkan, bersifat otoritatif, dan tidak berubah (Hood, Hill, & Williamson, 2005). Kelompok radikal Islam melakukan perlawanan terhadap pihak yang mengancam eksistensi mereka. Mereka berjuang untuk menegakkan cita-cita hidup mereka atas dasar nilai-nilai identitas mereka serta berjuang atas nama Tuhan (Taher, 1998).

Salah satu varian dari radikalisme adalah Jamaah Ansharu Tauhid (JAT). Faktor yang membedakannya dengan kelompok radikal Islam lainnya ialah pandangannya yang mengafirkan orang lain atau yang dikenal dengan paham *takfiri* (lihat juga Spalek, 2014). Mereka mengafirkan orang lain yang berbeda pandangan dengan dia dalam konteks demokrasi walaupun mereka muslim.

Dalam konteks pendekatan dalam mencapai tujuan ideologis, JAT bersifat permisif terhadap cara-cara yang ekstremis. Misalnya, ia memberi dukungan emosional terhadap pelaku bom Bali 1 tahun 2002. Mereka menganggap pelaku bom Bali sebagai 'saudara'. JAT juga mendukung eksistensi negara Islam Irak & Suria atau ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) dan mendukung Jabhah Nushroh (sayap Al-Qaidah). Bahkan, ia mengakuinya sebagai khilafah atau pemerintah resmi dan mengajak orang lain untuk mengakuinya juga sebagai khilafah. Sebaliknya, ia memandang pemerintah hasil proses pemilihan umum sebagai bagian dari 'sistem kafir'.

Pertanyaan penelitian yang peneliti jawab dalam tulisan ini adalah: bagaimana Jamaah Ansharu Tauhid (JAT) sebagai kelompok radikal melakukan inklusi terhadap pemerintah Indonesia sebagai negara demokrasi melalui praktik penggunaan bahasa di media online. Peneliti bertujuan ingin menemukan cara kelompok radikal merepresentasikan, menghadirkan pemerintah melalui praktik penggunaan bahasa di media komunikasi baru (dalam hal ini laman web).

Inklusi adalah cara merepresentasikan aktor sosial dan aksi sosial dengan menggunakan fungsi bahasa.

Dalam kaitannya dengan fungsi bahasa, asumsi teoretis penulis bahwa bahasa adalah wujud eksternalisasi kesadaran dari kesadaran penulis pesan itu sendiri. Aspek komunikasi dalam kajian ini adalah pada kajian pesan yang diartikulasikan lewat penggunaan bahasa. Bahasa secara aktif berperan dalam proses konstitusi realitas sosial dan pengalaman individu. Oleh karena itu, sejumlah ahli berkeyakinan bahwa bahasa tidak netral, pasif dalam menggambarkan realitas eksternal (antara lain, Edley, 2001; Gergen, 1985; Vološinov, 1973). Bahasa adalah materi ideologi (Bakhtin, 1986). Hal ini dapat diamati dalam praktik komunikasi.

Praktik komunikasi yang dimaksud terjadi di web. Web adalah kumpulan protokol dan standar yang digunakan untuk mengakses informasi di internet (Mirabito, Michael M. A., Morgenstern, 2004). Standard dimaksud adalah URL (*uniform resource locators*), HTTP (*hypertext transfer protocol*), dan HTML (*hypertext markup language*). Standard ini dipakai oleh *server* *www* dan *clients* untuk memberikan mekanisme untuk menempatkan, mengakses, memberikan informasi yang ada melalui protokol jaringan.

Web berkembang dari 1.0 ke 2.0. Era web 1.0 ini ditandai dengan munculnya beragam media baca baru melalui *world-wide-web*. Web 1.0 tidak bersifat interaktif, seperti koran dan majalah online, buku elektronik, penerbitan elektronik, perpustakaan elektronik, dan sebagainya. Sementara itu, web 2.0 menawarkan teknologi interaktif. Berbagai tipe konten media yang disediakan untuk umum dapat dipertukarkan dan diproduksi oleh penggunanya. Bahasa pemrograman (seperti HTML, *extensible markup language*, dll.) membantu konten tersebar ke para pengguna lainnya.

Salah satunya melalui *really simple syndication* (RSS). Dengan RSS ini, pengguna web yang sudah daftar akan mendapatkan pemberitahuan secara otomatis melalui surat elektronik jika ada pembaruan konten pada website tanpa harus mengunjunginya. Poster menggambarkan bahwa teknologi atau media baru bersifat: desentralisasi, dua arah, di luar kontrol negara, demokratis (mampu mempromosikan dan berorientasi pada kesadaran individual) (dalam Littlejohn & Foss, 2011, p. 341).

Jawaban atas pertanyaan di atas memberikan signifikansi sosial berupa penjelasan dan pemahaman

terhadap aksi terorisme, khususnya terorisme yang terjadi di Indonesia, yang dilegitimasi dengan argumen agama. Aksi terorisme adalah sebuah kekerasan (*violence*), kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Namun, praktik terorisme oleh kelompok radikal menjadi sebuah amalan mulia atau ibadah. Terorisme menjadi sebuah kejahatan yang dianggap suci (*sacred violence*). Klaim kesucian kekerasan tersebut bertolak dari argumen teologis.

Para peneliti khususnya para ahli psikologi sosial melihat bahwa nilai fundamentalisme agama (tentu dengan varian fundamentalisme agama) dan kekerasan atas dasar agama dapat diterapkan dalam konteks terorisme (antara lain, Ismail & Ungerer, 2009; Ramakhrisna, 2002, 2004; Tan, 2008, dalam Muluk, Sumaktoyo, & Ruth, 2013), dan konflik sosial (seperti Mulyadi, 2003; Pearce, 2004, dalam Muluk et al., 2013).

Dalam konteks ini, Silberman mengidentifikasi potensi-potensi yang mengondisikan paham radikalisme menyebabkan kekerasan, yaitu:

1. memiliki prasangka terhadap orang lain atas dasar nilai-nilai keyakinan agama tertentu;
2. memberikan pembenaran oleh otoritas agama terhadap tindakan tidak-bermoral yang mengatasnamakan Tuhan;
3. menghormati atau mentolerir paham keyakinan yang tidak menghormati orang lain;
4. berpikir tertutup dan sulit menerima atau menggunakan perspektif yang berbeda (*cognitive simplicity*); dan
5. melakukan kekerasan dengan cara *proselytization* (Silberman, 2005c). Cara ini dilakukan dengan cara membujuk atau memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu atau menjalankan praktik keberagamaan dengan cara tertentu.

Terkait dengan ini, riset BPS tentang indeks demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa indikator tingkat ancaman atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama cenderung tinggi. BPS mencatat persentasenya dari tahun 2009—2016, yaitu sebagai berikut: 85,76% (2009), 86,67% (2010), 76,97% (2011), 79,39% (2012), 78,18% (2013), 89,09% (2014), 80,15% (2015), 80,00% (2016) (BPS, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti membatasi masalah penelitian ini pada level teks yang dihasilkan oleh kelompok radikal. Teks yang

dimaksud adalah teks yang dipublikasikan pada situs JAT. Objek penelitian kajian ini adalah Jamaah Ansharu Tauhid (JAT). Fokus penelitian ini adalah cara JAT menginklusi pemerintah Indonesia di halaman website www.ansharuttauhid.com. (saat penulis menyelesaikan artikel ini, alamat tersebut tidak bisa diakses, dan tidak juga termasuk dalam daftar situs yang diblokir oleh pemerintah).

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan pencarian di kolom pencarian dengan menggunakan kata "demokrasi" sebab kata itu merupakan konteks isu penelitian ini. Hasilnya adalah artikel-artikel yang dimuat oleh JAT. Penulis memilih artikel-artikel yang khusus membahas masalah kepemimpinan demokratis/pemerintah.

Penulis menganalisis data yang ditemukan dengan analisis diskursus dengan pendekatan representasi aksi dan aktor sosial. Pendekatan aktor Leeuwen adalah salah satu pendekatan dalam kajian wacana. Kajian wacana sudah lazim dipakai dalam kajian komunikasi dengan fokus mengkaji teks atau bahasa di media. Teks merupakan praktik komunikasi yang penulis analisis.

Penulis mengidentifikasi ada beberapa pendekatan dalam kajian wacana yang penulis sebutkan berikut ini. (1) pendekatan analisis dispositif: memandang diskursus sebagai pengetahuan (Jäger, 2001, p. 42); (2) pendekatan sosiokognitif: menganggap diskursus sebagai peristiwa komunikatif, melibatkan interaksi percakapan dan teks tertulis selain aspek nonlinguistik (Van Dijk, 1997, 2007); (3) pendekatan diskursus-sejarah: memberikan penjelasan tentang jalinan hubungan antara bidang tindakan, genre, diskursus dan teks (Reisigl & Wodak, 2009, p. 97), (4) pendekatan hubungan dialektika-relasional diperkenalkan Fairclough (Fairclough, 1989, 1993, 1995): menganggap wacana adalah marketisasi dari kelompok dominan; (5) pendekatan korpus bahasa (Baker, 2006; McEnery & Wilson, 1996), dan (6) pendekatan aktor sosial (Leeuwen, 1996, 2008). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis model Theo Van Leeuwen, yang menekankan pada representasi tindakan sosial dan aktor sosial.

Model Analisis Theo Van Leeuwen: Representasi Aktor dan Aksi Sosial

Pendekatan wacana yang diperkenalkan oleh Van Leeuwen ini fokus pada cara untuk menginvestigasi representasi aksi atau aktor sosial, bagaimana mereka diposisikan. Pendekatan analisis wacana ini mencakup strategi pelenyapan (*exclusion*): bagaimana aktor atau

aksi sosial mengalami proses pelenyapan dalam teks; dan strategi kehadiran (*inclusion*): bagaimana teks media menghadirkan mereka.

Strategi pelenyapan. Teks melenyapkan aktor dan aksi sosial dengan teknik *suppression* dan *backgrounding*. Teknik *suppression* melenyapkan aktor dan aksi sosial sehingga mereka tidak dapat dilacak dalam teks mana pun. Sementara itu, pelenyapan dengan teknik *backgrounding* menyisakan jejak (*traces*) sehingga peneliti dapat mendeteksi siapa aktor dan aksi sosial yang dilenyapkan.

Teknik *suppression* dapat diidentifikasi dari struktur kalimat yang berbentuk pola kalimat pasif, klausa nonfinitif atau infinitif, penghilangan *beneficiaries* (aktor yang mendapatkan keuntungan dari suatu tindakan), nominalisasi, kalimat adjektif, penghilangan partisipasi pelaku. Teknik *backgrounding* dapat diidentifikasi dari struktur kalimat elipsis, klausa noninfinitif, klausa infinitif, dan klausa parataktis (Leeuwen, 2008).

Strategi kehadiran. Strategi ini menghadirkan aktor sosial dengan teknik-teknik tertentu. Pertama, alokasi peran: struktur kalimat aktif atau struktur kalimat pasif. Cara pengaktifan (*activation*) kalimat merepresentasikan aktor sebagai orang yang aktif. Fungsi pemasifan (*passivation*) dalam kalimat merepresentasikan aktor sebagai orang “yang menerima akhir dari aktivitas” (Halliday dalam Leeuwen, 2008, p. 33).

Pengaktifan dilakukan dengan partisipasi (memosisikan aktor sosial dalam tata bahasa sebagai partisipan), peran aktif aktor, penambahan kata depan atau preposisi (antara lain kata “oleh” atau “dari”), nominalisasi, kata benda kepemilikan atau posesifikasi.

Kedua, teknik generalisasi/spesifikasi. Generalisasi terjadi dengan cara pluralisasi aktor sosial. Aktor sosial direpresentasikan dengan teknik asimilasi dan kolektivisasi. Sementara itu, spesifikasi dilakukan dengan singularisasi. Ketiga, teknik asosiasi/disosiasi. Asosiasi umumnya memiliki pola berupa struktur frase/kalimat parataktis, kata ganti yang menunjukkan kepemilikan (*possessive pronouns*), dan *possessive attributif*.

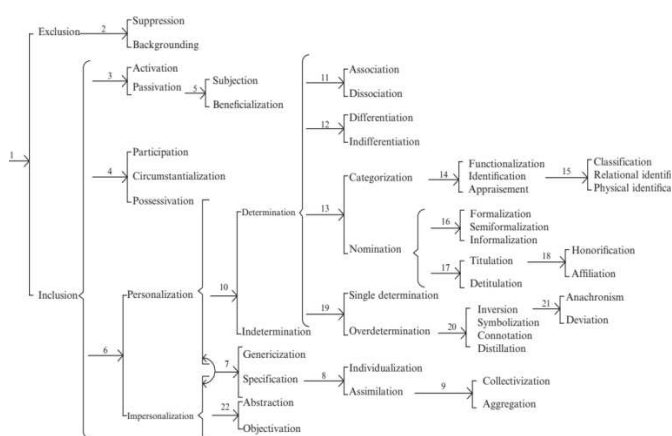
Keempat, determinasi dan indeterminasi. Cara indeterminasi merepresentasikan aktor sosial secara tidak spesifik sebagai individu atau sebagai kelompok, atau secara anonim. Contoh indeterminasi ialah dengan menggunakan kata benda tidak tentu (misalnya ‘seseorang’, ‘beberapa’), dan dengan referensi *exophoric*. Sementara itu, determinasi

merepresentasikan aktor sosial secara spesifik. Cara determinasi ialah dengan teknik asosiasi-disosiasi, diferensiasi-indiferensiasi, nominasi-kategorisasi, determinasi tunggal, atau overdeterminasi.

Asosiasi merujukkan aktor sosial kepada kelompok yang aktor sosial bentuk dan/atau kelompok aktor sosial yang tidak pernah dilabeli dalam teks. Pola umum asosiasi adalah parataksis, kata benda kepemilikan, dan klausa posesif atributif. Nominasi merepresentasikan aktor sesuai identitasnya. Nominasi menggunakan *proper noun*, penghormatan, atau gelar palsu. Kategorisasi merepresentasikan aktor sesuai dengan identitas kelompok yang memiliki kesamaan dengan aktornya. Caranya ialah dengan menunjukkan fungsi dan peran sosialnya (siapa mereka: kelas sosial, identitas hubungan sosial, dan identitas fisik).

Kelima, personalisasi & impersonalisasi. Personalisasi merepresentasikan aktor sosial sebagai manusia. Sementara itu, impersonalisasi merepresentasikan aktor dengan kata benda abstrak dan kata benda bukan untuk manusia. Ini dilakukan dengan abstraksi dan objektivikasi, dengan merujuk ke antara lain asal daerah, ujaran, alat yang aktor pakai, karakteristik tubuh aktor (dikenal dengan somatisasi).

Keenam, aktor sosial bisa juga di representasikan dengan cara overdeterminasi yang mencakup inversi, simbolisasi, konotasi, distilasi. Dengan overdeterminasi, aktor direpresentasikan dalam teks melakukan lebih dari satu praktik sosial. Kerangka analisis wacana versi Theo Van Leeuwen di atas dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 Model Analisis Theo Van Leeuwen (2008). Sumber: Leeuwen (2008, p. 52 tabel 2.4. Social Actor Network.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis merasa perlu menyampaikan profil singkat JAT di Indonesia sebelum menunjukkan hasil penelitian. JAT didirikan oleh Abu Bakar Baasyir pada

bulan Juli 2008. Baasyir memutuskan untuk membuat JAT karena tidak adanya kesamaan tujuan dengan anggota Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Sebelumnya, Baasyir menjadi amir MMI.

Pembentukan JAT ini menarik mereka yang mendukung Abu Bakar Baasyir di MMI dan beberapa anggota Jamaah Islamiyyah (JI). Hal ini karena JAT memiliki dasar ideologi yang sama dengan Jamaah Islamiyyah. JAT menjadi pendukung gerakan ISIS di Indonesia bersama dengan kelompok yang bernama Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), serta pengikut Aman Abdurrahman (Tomsa, 2016).

Perselisihan antara Baasyir dengan anggota JAT tentang dukungan kepada ISIS menciptakan perpecahan (Galamas, 2015). Sebagian anggota menolak pergerakan ISIS di Indonesia. Karenanya, Abu Bakar Baasyir memutuskan bahwa seluruh anggota JAT yang menolak klaim ISIS tentang statusnya sebagai khilafah itu harus keluar dan tidak lagi dalam satu ikatan dengan JAT.

Para anggota JAT yang dikeluarkan ini kemudian membentuk dan mendeklarasikan Jamaah Ansharu Syariah (JAS) pada bulan Agustus 2014. Mochammad Achwan (pada saat itu bertindak sebagai pemimpin JAT) dan Abdul Rohim dan Rosyid Ridho (putra Baasyir) memutuskan untuk membentuk kelompok ini (lihat pernyataan Amir Jamaah Ansharusy Syariah Muhammad Achwan, seperti dilaporkan Berita Satu, 2014). Sebagian mantan anggota JAT yang lain membentuk Jamaah Ansharu Daulah (JAD) menjadikan Aman Abdurrahman sebagai ketua jamaah. Sekarang, ia yang juga dikenal dengan nama Oman Rochman alias Abu Sulaiman mendapat hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2018 (Kompas, 2018).

Sistem organisasi perjuangan JAT berbentuk jamaah dan imamah, yaitu sistem kepemimpinan tunggal dan kolektif. Dalam sistem ini, amir jamaah dipilih oleh ulama, para cendekiawan, atau tokoh. Amir tidak perlu diganti selama masih hidup dan mampu melaksanakan amanah jamaah dan tidak melanggar syariat Islam. Jadi, tidak perlu adanya penggantian amir secara periodik dalam suatu kongres. Amir membentuk majelis syura dari ahli ilmu dan tokoh masyarakat untuk membantunya dalam memberikan pemikiran dalam melaksanakan tugasnya. Amir tidak terikat dengan hasil musyawarah majelis syura tersebut, tetapi memilih beberapa pandangan yang diyakini lebih tepat. Amir wajib ditaati selama perintah

dan kebijaksanaannya bukan maksiat berdasarkan dalil yang kuat (*qath'i*). Amir dan anggota jamaah wajib selalu saling memberikan wasiat dan saling mengingatkan (JAT, 2008).

Penelitian ini menemukan artikel di halaman web situs milik JAT pada periode 2010--2014. Artikel tersebut berisi sikap, pandangan JAT, khususnya

pandangan pimpinan JAT, yakni, Abu Bakar Baasyir. Halaman web juga memuat posting khotbah pimpinan JAT, baik khotbah shalat Jumat dan shalat hari raya Idul Fithri). Dengan demikian, artikel web tersebut tidak dapat digolongkan sebagai karya jurnalistik melainkan alat untuk melakukan propaganda untuk kepentingan atau tujuan JAT.

Tabel 1 Artikel Jamaah Ansharu Tauhid dalam Isu Demokrasi (2009--2014)

JUDUL	EDISI
<i>Taujih</i> Amir Jamaah Ansharut Tauhid	21092008
Aksi Solidaritas <i>Ummat</i> untuk Palestina	14072009
Pemilihan Presiden RI	14072009
Pembantaian Muslim Uighur di Xinjiang Cina	16072009
Dakwah Tauhid, Tuntutan dan Realitanya	22072009
Membangun Jamaah yang Berprestasi	23072009
Penghinaan Kepada Nabi Muhammad SAW	23072009
Penolakan Eksekusi Mati Trio Mujahid	23072009
Serangan Biadab Israel ke Gaza	23072009
Sikap JAT tentang Demokrasi	23072009
Kronologi Upaya Pencekalan Dakwah Ust. ABB di Malang	06112009
Khutbatul Ied Ustaz ABB 1430 H	24112009
Kronologis dan Penjelasan Sikap JAT terhadap Insiden Masjid Amar Makruf Nahi Mungkar, Bulak Kapal, Bekasi	24122009
Aqidah dan Manhaj	30062011
Pernyataan Sikap JAT terhadap Insiden Bima dan Mojokerto	20062011
JAT Siap Hadapi Isu Pembubaran!	11062011
JAT Mengutuk Keras Pembunuhan Muslimin di Sape NTB	25122011
RUU Ormas Menghina Syariat Allah	29012012
Pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid tentang akun FB Palsu	14022012
Pernyataan Fitnah kepala BNPT Ansyad Mbai	20122013
Tindakan Extra Judicial Killing oleh Densus 88	02012014
Pernyataan Fitnah dan "Ngawur" Kapolri Sutarnan tentang Buku Tadzkirah	03012014
Press Release JAT tentang Pernyataan Fitnah Kombes Pol Rikwanto	19022014
Bayan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tentang Demokrasi	09032014
Seruan Ust. Abu Bakar Ba'asyir kepada Mujahidin Di Bumi Syam	10032014
Disiplin Dalam Berjamaah, Bukti Kesungguhan I'dad & Jihad	17032014
Pernyataan Sikap JAT tentang Vonis Hukuman Mati 529 Muslim di Mesir	31032014
Dampak Kerusakan Demokrasi	10042014
Sambil <i>Nyeker</i> , Ratusan Anggota JAT Jabar Gelar Aksi <i>Long March</i>	14042014
Makar Musuh-Musuh Islam	24042014
Hadapi Fitnah di Jama'ah, JAT Jawa Timur menyolidkan Anggotanya	28042014
Siapakah yang Lebih Baik <i>Din</i> nya?	01052014
Laksanakan Syari'at Islam	08052014
Syariat Islam Telah Sempurna	22052014
Sikap Ustaz. Abu Bakar Ba'asyir Terkait Fitnah Terhadap JAT	04062014
Ramadan Mendidik Kita untuk Ikhlas	03072014
JAT Rilis Risalah Peringatan & Nasihat karena Allah untuk NKRI	05072014
Berpijak di atas Kebenaran	21072014
Pernyataan Sikap JAT terhadap Umat Islam yang Menolak Khilafah Islamiyyah	03092014
Risalah Untuk Kaum Muslimin Indonesia Yang Ragu akan Daulah Khilafah	29102014
Cara Memilih Pemimpin di Zaman Sahabat	17042014

Sumber: Hasil penelitian 2015.

Wacana yang muncul di situsnya ditulis oleh pimpinan di organisasi JAT, kebanyakan ditulis oleh Abu Bakar Baasyir. Isu sentral dari pandangan JAT mengangkat isu demokrasi. Demokrasi adalah kendaraan untuk melakukan konstruksi terhadap atau delegitimasi pemerintah Indonesia. Tabel 1 menunjukkan judul-judul artikel yang mengangkat isu demokrasi 2009--2014. Di dalam isu ini, JAT merepresentasikan pemerintah sebagai produk dari sistem demokrasi.

Penulis secara menentukan secara apriori bagian mana dalam artikel di atas yang mengandung representasi pemerintah. Adapun cara JAT dalam merepresentasikan pemerintah Indonesia ialah dengan memosisikan pemerintah sebagai 'orang luar', *outsider*.

Peneliti menemukan bahwa cara yang JAT pakai dalam menghadirkan pemerintah Indonesia sebagai pemerintah demokratis dilakukan dengan inklusi dengan teknik generalisasi (dengan asimilasi), diferensiasi, instrumentalisasi, nominasi, dan gelar palsu yang negatif, dan teknik epitet. Sebaliknya, JAT melakukan inklusi terhadap mereka yang dianggap sama (homofili, orang dalam, *insider*) dengan cara honorifikasi atau penghormatan. Berikut uraiannya.

JAT menginklusi pemerintah Indonesia sebagai *outsider* dalam makna pemerintah dianggap menganut agama yang berbeda walaupun pemerintah (presiden) Indonesia beragama Islam. Bagi JAT, demokrasi adalah agama. Pemerintah diinklusi sebagai aktor yang melakukan 'tekanan, ancaman' terhadap JAT. Dalam artikel berjudul "*JAT Siap Hadapi Isu Pembubaran!*", JAT memosisikan diri sebagai kelompok yang mendapat tekanan, ancaman dari pemerintah. Aktivasi yang dilakukan oleh JAT ialah merepresentasikan pemerintah sebagai entitas yang berbuat zalim. Berikut kutipannya.

"Layaknya sebuah jamaah, apalagi terbilang baru, Jamaah Ansharu Tauhid tidak sepi dari berbagai *pressure* yang dilakukan oleh pemerintah yang mengusung agama demokrasi. Sejak kasus terorisme yang disematkan pada jamaah ini sampai penangkapan amirnya, Ustaz Abu Bakar Baasyir, ternyata semakin menambah *istiqomah* dalam menyikapi isu-isu pembubaran JAT" (Muntaha, 2011).

Kalimat di atas berpola kalimat aktif. JAT menurut tata bahasa menempati posisi sebagai subjek atau agen

aktif. Kalimat di atas menyebutkan JAT sebagai aktor sosial yang spesifik (*specificization*). Ini berbeda ketika menyebutkan "*pemerintah*" yang disebut secara umum dengan teknik generalisasi. Ini memberi makna bahwa korban aksi pemerintah tidak dialami oleh organisasi lain.

Walaupun secara tata bahasa JAT sebagai aktor sosial diposisikan sebagai subjek, tapi sebenarnya secara sosiologis, makna yang terkandung di kalimat tersebut adalah JAT sebagai objek dari tindakan '*pressure*'. Penempatan kata 'berbagai' (dalam bahasa ini berfungsi sebagai *premodification*) sebelum kata *pressure* menunjukkan bahwa *pressure* atau tekanan yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan hanya satu atau sekali saja tapi berkali-kali.

Pemerintah direpresentasikan pada kalimat di atas sebagai aktor sosial dalam arti umum bukan spesifik misalnya badan penanggulangan terorisme (BNPT) atau badan, kementerian atau lembaga negara lainnya. Cara inklusi aktor sosial seperti ini disebut dengan asimilasi, yaitu menghadirkan aktor sosial -yakni pemerintah- sebagai kelompok atau organisasi keseluruhan.

Adapun anak kalimat yang berbunyi "[*pressure*] yang dilakukan oleh pemerintah yang mengusung agama demokrasi" merepresentasikan pemerintah sebagai agen aktif walaupun pola kalimat di atas pasif menurut tata bahasa. Pemerintah melakukan dua aksi sosial, yaitu: "melakukan *pressure*" dan "mengusung agama demokrasi".

Frase 'agama demokrasi' menunjukkan konstruksi JAT dalam melihat orang lain yang berbeda dengan konsep identitas jamaah JAT itu sendiri. Mode inklusi aktor sosial ini menurut model semiotika sosial Theo Van Leeuwen disebut dengan diferensiasi (*differentiation*). Pemerintah juga sering disebut sebagai '*pemerintah thoghut 'ndonesia*'. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) disebut konsorsium setan.

Dalam artikel "*Siapakah yang Lebih Baik Din-Nya?*", JAT merepresentasikan bagaimana pemerintah Indonesia. Pemerintah divonis pasti tidak akan membawa pada keadilan. Menurutnya, ini karena undang-undang dalam sistem demokrasi dibuat oleh penguasa zalim (JAT, 2014).

Penguasa juga diinklusi dengan metafora dengan ekspresi kata 'tangan kotor' yang memodifikasi makna penguasa. Penguasa juga dimodifikasi dengan menggunakan kata sifat zalim yang mempertegas dan memperjelas representasi aktor sosial (pemerintah).

Cara ini dikenal dengan modifikasi adjektif atau *adjectival modification*. Berikut ini kutipannya.

Tidak ada satu manusia pun, walaupun kafir, yang hidup di bawah undang-undang-Nya pasti dia tidak akan mendapatkan keadilan sejati yang menentramkan hati. Karena pada hakikatnya hukum yang dibuat menggunakan tangan kotor penguasa zalim tidak akan pernah berpihak pada keadilan yang benar-benar menyamakan seluruh warga negara di hadapan hukum. Tidak sama sekali! Hukum itu adalah untuk rakyat jelata, bukan untuk penguasa yang menyombongkan diri (JAT, 2014).

Aktor sosial dalam kalimat di atas adalah pemerintah yang digambarkan dengan teknik instrumentalisasi. Teknik ini merepresentasikan aktor sosial dengan menyebut apa yang ia hasilkan/buat. Produk yang pemerintah hasilkan adalah undang-undang. Paragraf di atas mendelegitimasi sistem demokrasi yang dianggap tidak menghasilkan keadilan. Keadilan ini diceritakan tidak akan diperoleh manusia. Ini dipertegas dengan klausa “*tidak ada satu manusia pun, walaupun kafir*”, dan dengan kata “*pasti*”, “*tidak akan pernah berpihak [pada keadilan]*”. Ini memberi makna tertutupnya semua kemungkinan bahwa sistem ini bisa memberikan kebaikan bagi masyarakat.

Pemerintah pada kalimat di atas direpresentasikan secara negatif dengan cara nominasi, yaitu dengan memberikan gelar palsu atau *pseudo title* yang negatif. Pemerintah digelari dengan ‘*penguasa zalim*’ yang memiliki ‘*tangan kotor*’. Pemerintah juga diberi keterangan berupa klausa yang juga bersifat negatif, yaitu ‘*penguasa yang menyombongkan diri*’.

JAT mengonstruksi pemerintah dengan sifat-sifat buruk: ‘munafik’, ‘hedonis’, ‘sombong’, dan ‘dusta’. Pemerintah tidak akan membawa ke kondisi yang lebih baik. JAT kemudian bersikap ekstrem, yang bertentangan dengan negara Indonesia dengan mengatakan bahwa pegawai yang bekerja pada sistem pemerintah yang tidak menerapkan sistem Islam berstatus murtad. Dengan mengikuti logika berpikir ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang menjadi pegawai negeri sipil dan militer, menjadi panitia pada komisi pemilihan umum berstatus kafir karena telah murtad tadi.

JAT merepresentasikan pemerintah Indonesia dengan cara inklusi *impersonalized*. Aktor sosial direpresentasikan berdasarkan perbuatan atau

objectivation-instrumentalization, dan dengan cara overdeterminasi berupa simbolisasi konotatif. Misalnya, JAT mengatakan pemerintah Indonesia ‘sebagai thoghut’, ‘sebagai konsorsium setan’.

JAT juga menggambarkan pemerintah dengan cara asimilasi-kolektivisasi. Ini adalah strategi wacana untuk memberikan dampak yang besar bagi terciptanya opini masyarakat. JAT menginklusi pemerintah juga dengan *teknik epitet*, yakni memberikan penjurukan. Kami menemukan penjurukan dengan memakai kata ‘jahil’ (ini dapat disinonimkan dengan kata bodoh). Teknik epitet ini adalah upaya untuk mendelegitimasi pemerintah.

JAT dalam merepresentasikan aktor sosial dari pihak yang sepaham dengannya (pelaku bom Bali) dengan cara inklusi nominasi honorifikasi (*inclusion-nomination-honorification*) dengan mengatakan mereka adalah ‘saudara’ (Baasyir, 2008).

Sikap JAT terhadap pemerintah terlihat juga ketika ia menyikapi eksekusi pelaku bom Bali. Dalam pernyataannya tentang penolakan eksekusi mati trio mujahid, JAT menolak pelaksanaan eksekusi mati terhadap Mukhlas, Imam Samudera dan Amrozi, yang mereka anggap sebagai ‘saudara’, menganggap putusan ini sebagai keputusan yang zalim, yang pemerintah lakukan. JAT berargumen bahwa keputusan pemerintah bertentangan dengan hukum Allah, dan tidak berdasar fakta yang sebenarnya. Pemerintah telah melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar.

JAT juga meminta pemerintah untuk menghukum-mati pelaku teror umat Islam di Ambon, Maluku, Lampung, Tanjung Priok, dan Poso. Menurutnya, teror yang telah menelan korban ribuan umat Islam tersebut itu diperankan oleh orang-orang kafir (Baasyir, 2008).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok radikal merespon demokrasi dengan cara memberikan penolakan dan semua yang dihasilkan dari sistem demokrasi ini. Fenomena representasi kelompok radikal terhadap pemerintah seperti digambarkan dalam hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang keterkaitan radikalisme agama dan terorisme dengan berdasarkan pada perspektif teks dalam isu modernitas (demokrasi).

Kajian ini sejalan dengan argumen Crenshaw. Ia berargumen bahwa terorisme radikal lahir sekarang ini adalah bagian dari fenomena modernitas dan modernisasi, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan gerakan terorisme sebelumnya (Crenshaw, 2011). Modernisasi memberikan peluang bagi

kelompok radikal untuk mengeksternalisasi nilai-nilai mereka. Modernisasi juga menghasilkan seperangkat keterkaitan antar faktor yang menjadi penyebab terorisme, antara lain kompleksitas masyarakat dan ekonomi, jaringan transportasi dan komunikasi, sarana publisitas untuk teroris (Crenshaw, 2011).

Dalam konteks nilai-nilai radikalisme, faktor-faktor modernisme (demokrasi, jaringan transportasi dan komunikasi khususnya internet dan media sosial) memberi peluang untuk eksternalisasi nilai radikalisme. JAT menyatakan sikapnya secara jelas di laman web tentang “demokrasi”, tanggal 23 Juli 2009 No. 04/IV/1430. Ia mengungkapkan dasar argumennya berdasarkan Al-Quran (surat Al-Furqon: 2; An-Nahl: 36; Asyura: 21; Al-Baqarah: 22), sebagai konsiderans dalam menilai demokrasi.

Nilai atau dasar teologi tadi menjadi pijakan atau basis rujukan dalam menilai sistem dan nilai demokrasi. Sumber nilai atas dasar teologi tersebut menjadi bagian dalam kerangka kognisi mereka. JAT menjadikan agama sebagai sumber sistem makna dalam memaknai dunia atau realitas sosial. Para ahli psikologi sosial menyebut ini dengan istilah sistem idiosinkratis (Eidelson & Eidelson, 2003; Fox, 2000; Silberman, 2004, 2005a, 2005b).

Hal itu berarti bahwa seseorang mengonstruksi diri mereka, mengonstruksi orang lain, dan dunia, memberikan makna atas pengalaman, menetapkan tujuan, merencanakan aktivitas, dan mengatur perilaku mereka dengan merujuk ke sistem makna tadi. Sebagai sistem makna, nilai-nilai agama dapat dipelajari. Perbedaannya dengan sistem lainnya adalah, ia dipersepsikan sebagai nilai yang sakral.

Menurut penjelasan Silberman bahwa landasan teologi di berpotensi pada pembenaran/justifikasi, keyakinan akan nilai kesucian sebuah aksi kekerasan. Aksi terorisme adalah salah satunya dari aksi kekerasan yang dianggap suci (*sacred violence*). Namun, bukan nilai teologi *an-sich* yang menjadi penyebab. Ada faktor lain, yaitu: *cognitive simplicity*.

Ini terbukti pada representasi JAT terhadap pelaku bom Bali. JAT menginklusi mereka sebagai mujahid (orang yang melakukan Jihad). Tiga pelaku bom Bali disebut dengan ‘*Trio Mujahid*’, bukan trio bom Bali (Baasyir, 2008). Hal ini menunjukkan adanya *cognitive simplicity* dalam bentuk pemahaman makna jihad yang dimaknai hanya dalam perspektif kekerasan (*violence*).

Temuan ini mengonfirmasi riset yang dilakukan Hamdi Muluk dkk., dan sekaligus melengkapi kajian tersebut pada aspek representasi pemerintah dalam

teks. Ia melakukan dua studi secara kuantitatif untuk menguji peran mediasi keyakinan dalam jihad dengan kekerasan pada kekerasan sakral. Muluk dkk. berargumen, keyakinan dalam jihad kekerasan berfungsi sebagai pembenaran untuk kekerasan sakral. faktor yang berpengaruh terhadap kekerasan adalah hanya konsep jihad, bukan karena variabel prediktor berupa religiusitas, nilai fundamentalisme, dukungan untuk hukum Islam, atau persepsi ketidakadilan (Muluk *et al.*, 2013).

Dalam konteks penggunaan media baru sebagai sarana komunikasi, kelompok radikal mendapat ‘keuntungan’. Web memfasilitasi mereka untuk melakukan *encoding* pemahaman radikalisme mereka. Mereka mendapatkan keuntungan karena batasan negara terhadap paham radikal longgar. Penyebaran paham radikalisme di media arus utama (media cetak dan televisi) mendapat hambatan oleh kontrol negara (Littlejohn & Foss, 2011).

Kelompok radikal menikmati dua kesempatan. Pertama, demokrasi. Mereka menikmati kebebasan untuk mempromosikan nilai-nilai dan paham radikal kepada sesama pengguna web. Kedua, teknologi. Kelompok radikal mendapat keuntungan berupa efisiensi penyebaran paham mereka. Teknologi web yang mengandalkan prasarana teknologi jaringan internet (*local area network*, *wide area network*, kabel, dsb.), tanpa batasan geografis mampu mentransmisikan pesan sampai ke pengguna akhir.

Dengan demikian, praktik penggunaan media bergantung kepada aspek budaya / *cultural aspect* (nilai dan tujuan) dari pengguna teknologi. Fungsi media/teknologi web dalam kaitannya dengan masyarakat pengguna teknologi itu sendiri adalah memfasilitasi nilai, tujuan dari pengguna web. Kehadiran media komunikasi baru sebagai saluran praktik komunikasi untuk mengonstruksi atau merepresentasikan realitas sosial -aksi dan aktor sosial- menempati perang strategis sebagai media (teknologi) yang mampu menyampaikan tujuan penggunanya. Penggunaan web oleh kelompok radikal menjadikan peran media sebagai alat untuk kepentingan nilai-nilai radikalisme dan tujuan mereka.

Dalam hal ini, Pacey menawarkan perspektif budaya teknologi (*the culture of technology*) dalam melihat praktik penggunaan teknologi. Menurutnya, titik tolak orang menggunakan teknologi adalah karena pertimbangan nilai-nilai (kesadaran) seseorang dan tujuan mereka. Dengan demikian, penggunaan teknologi menjadi tidak netral. Netralitas teknologi

hanya muncul dalam aspek teknik (Pacey, 1983). Kita bukan hanya ditentukan oleh teknologi seperti yang dipostulatkan oleh perspektif determinisme teknologi, seperti McLuhan (McLuhan, 1994). Namun, mampu menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai pengguna.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia sebagai negara demokrasi direpresentasikan sebagai liyan atau *outsider*. JAT mendelegitimasi pemerintah Indonesia dengan sejumlah teknik bahasa sebagai media merepresentasikan pemerintah. Dengan Model Van Leeuwen, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah direpresentasikan simbolisasi dengan *thoghut*, teknik pemberian gelar yang negatif, dan penjulukan yang negatif (*epitet*). Sebaliknya, kepada pelaku terorisme, JAT memberikan simpati. Pelaku bom diinklusi dengan honorifikasi.

Adapun dasar melakukan representasi adalah bertolak dari perspektif teologi yang mereka pahami. JAT memahami, *demokrasi adalah sebuah agama*. Nilai-nilai agama yang mereka interpretasikan ini menjadi sistem idiosinkratik dalam memaknai realitas, dalam konteks ini adalah demokrasi. Adapun implikasi dari representasi pemerintah seperti digambarkan ini membenarkan aksi-aksi yang dianggap suci, berpahala.

Eksternalisasi nilai agama yang diinterpretasikan mereka ini mendapat peluang dengan adanya perkembangan teknologi media baca (seperti *web*). Peluang ini dimanfaatkan untuk menularkan (*contagion*) pesan mereka sehingga meluas seiring dengan kapasitas teknologi yang dipakai.

Dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai salah satu negara yang andil dalam melawan ancaman terorisme, kajian ini memberikan rekomendasi praktis agar pemerintah melakukan upaya identifikasi sebaran paham-paham radikal yang ada di media baru. Cara yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi situs-situs yang anti terhadap pemerintah atau mendelegitimasi pemerintah. Kajian ini memberikan rekomendasi agar teknik identifikasi ini berdasarkan wacana yang sesuai dengan sikap mereka terhadap pemerintah.

Representasi tentang ‘pemerintah thoghut’ dan ‘agama demokrasi’ dapat dijadikan dasar pencarian (*query*) untuk mengidentifikasi media mana saja yang mengandung wacana ‘pemerintah thoghut’, ‘agama demokrasi’.

Terkait dengan pemerintah Indonesia yang berusaha mencegah aksi terorisme bukan hanya dengan *hard power* dalam bentuk penegakan hukum, penindakan oleh kepolisian melainkan juga dengan *soft power*. Pencegahan dengan *soft power* ini dilakukan melalui institusi pendidikan dan konten di ruang atau mimbar publik. Maka, identifikasi dan kontrol atas produksi dan distribusi Konten ‘pemerintah thoghut’ dan ‘agama demokrasi’ perlu mendapat perhatian serius.

Implikasi sosial riset ini menunjukkan fakta mengenai penggunaan teknologi yang bergantung kepada nilai dan tujuan pengguna teknologi itu sendiri. Teknologi tidak selalu memberikan dampak seperti yang diharapkan oleh pengembang atau inisiator teknologi. Sebagai contoh, program pemerintah Indonesia dengan membangun jaringan internet (*Indonesia connected*) harus diikuti adanya kewaspadaan akan penggunaan yang menciptakan diskonektivitas kultural (seperti munculnya gerakan separatisme, dan paham anti terhadap nasionalisme lainnya), yang justru muncul setelah konektivitas jaringan di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini ialah tidak menggunakan perspektif jaringan untuk menjelaskan fenomena pesan kelompok radikal di media baru ini menjadi alternatif untuk melakukan studi lebih lanjut terkait dengan isu radikalisme ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dr. Basuki Yusuf Iskandar) atas kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti program pasca sarjana di Universitas Indonesia. Terima kasih saya ucapkan ke Prof. Dr. Ibnu Hamad, Dr. Udi Rusadi yang mengajarkan Teori dan Analisis Wacana di Universitas Indonesia, dan kepada Dr. Eriyanto.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, K. (2000). *The battle for God*. (W. G. Tonetto, Ed.) (1st ed.). New York: f Random House, Inc.
- Baasyir, A. B. (2008). Penolakan eksekusi mati Trio Mujahid (pernyataan jamaah Ansharu Tauhid Tanggal 30 Dzulhijjah 1429/29 Desember 2008 Tentang Penolakan Eksekusi mati Mujahid Bali).
- Baker, P. (2006). *Using Corpora in Discourse Analysis*. Continuum, 2006. *Applied Linguistics*. London: Continuum International Publishing Group.
- Bakhtin, M. M. (1986). *Speech Gere and Other Late Essays*.

- (C. Emeron & M. Holquit, Eds.) (1st ed.). Texas: University of Texas Press.
- BAPPENAS and UNDP. (2016). *Measuring Democracy In Indonesia 2009 Indonesia Democracy Index*. Jakarta.
- Berita Satu. (2014). Menolak ISIS, Anggota JAT Bentuk Jemaah Baru. Retrieved August 13, 2018, from <http://www.beritasatu.com/aktualitas/202030-menolak-isis-anggota-jat-bentuk-jamaah-baru.html>
- BPS. (2017). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator, 2009-2016. Retrieved August 15, 2018, from <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/12/21/1276/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator-2009-2016.html>
- Castells, M. (1997). *The Information Age : Economy, Society And Culture Volume II, The Power of Identity* (1st ed.). Blackwell: Oxford University Press.
- Crenshaw, M. (2011). *Explaining Terrorism: Causes, Processes and Consequences*. London: Routledge.
- Edley, N. (2001). Unravelling social constructionism. *Theory & Psychology*, 11(3), 433-441.
- Eidelson, R. ., & Eidelson, J. . (2003). Dangerous ideas: Five beliefs that propel groups toward conflict. *American Psychologist*, 58(3), 182-192.
- Esposito, J. L. (1988). *ISLAM : The Straight Path* (3rd ed.). London: Oxford University Press.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power. Language in social life series*. <https://doi.org/10.2307/329335>
- Fairclough, N. (1993). Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public Discourse. *Discourse & Society*, 4(2), 133-168. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002002>
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis*. London: Longman.
- Fox, J. (2000). Is Islam more conflict prone than other religions?: A cross-sectional study of ethnoreligious conflict. *Nationalism and Ethnic Politics*, 6(2), 1-23.
- Gaffar, A. (1996). *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Galamas, F. (2015). *Terrorism In Indonesia: An Overview, in "The militant groups of radical ideology and violent nature series area: Indian subcontinent and Southeast Asia"* (No. 4).
- Gergen, K. J. (1985). The Social Constructionist Movement in Modern Psychology. *American Psychologist*, 40(3), 266-275. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.40.3.266>
- Haqqani, H. (2013). Islamists and Democracy: Cautions from Pakistan. *Journal of Democracy*, 24(2).
- Harrison, C. (2018). *Leadership Theory and Research: A Critical pproach to New and Existing Paradigms*. Hamilton, UK: Palgrave Macmillan.
- Hood, R. W., Hill, P. C., & Williamson, W. P. (2005). *The Psychology of Religious Fundamentalism*. New York, NY: The Guilford Press.
- Huntington, S. P. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. (Asril Marjohan, Ed.). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Jäger, S. (2001). Discourse and knowledge: theoretical and methodological aspects of a critical discourse and dispositive analysis. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of critical discourse analysis* (1st ed.). London: SAGE Publication Inc.
- JAT. (2008). Taujih Am Amir Jamaah Ansharut Tauhid (Disampaikan pada Deklarasi Jama'ah Ansharut Tauhid Jakarta, Rabu, 17 Ramadhan 1429 H/17 September 2008M). Retrieved December 29, 2014, from <http://www.ansharuttauhid.com/read/publikasi/139/taujih-am-amir-jamaah-ansharut-tauhid/#sthash.jFxFsInOl.dpuf>
- JAT. (2014). "Siapakah yang Lebih Baik Din-nya?", Khutbah Jum'at Edisi 009, tanggal 02 Rajab 1435H. Retrieved May 1, 2014, from <http://ansharuttauhid.com/read/sariyah/444/siapakah-yang-lebih-baik-dinnya-khutbah-jumat-edisi-009/#sthash.CwgiHGMd.dpuf>
- Kompas. (2018). Vonis Mati untuk Aman Abdurrahman. Retrieved October 29, 2018, from <https://megapolitan.kompas.com/jeo/vonis-mati-untuk-aman-abdurrahman>
- Leeuwen, T. V. (1996). The representation of social actors. In C. R. Caldas-Coulthard & M. Coulthard (Eds.), *Texts and practices: Readings in critical discourse analysis* (1st ed., pp. 32-70). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Leeuwen, T. V. (2008). *Discourse and practice: new tools for critical discourse analysis*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Lestari, N. (2014). *Wacana Demokrasi dalam Public Sphere Komunikasi Politik di Organisasi Islam Indonesia (Analisis Wacana Demokrasi di HTI, FPI, Muhammadiyah, dan NU)*.
- Liddle, R. W. (1996). Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action. In M. R. Woodward (Ed.), *Toward A New Paradigm: Recent Development in Indonesian Islamic Thought*. Tempe-Arizona: Arizona University Press.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of Human Communication* (10th ed.). Illinois: Waveland Press, Inc.
- Mahendra, Y. I. (1999). *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaa'at-i-Islami (Pakistan)* (1st ed.). Jakarta: Paramadina.
- McEnery, T., & Wilson, A. (1996). *Corpus linguistics: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- McLuhan, M. (1994). *Understanding media: The extensions of man*. Massachusetts: MIT Press.
- Mirabito, Michael M. A., Morgenstern, B. L. (2004). *The New Communications Technologies : Applications, Policy, and Impact* (5th ed.). Oxford, UK: Elsevier Inc.
- Muluk, H., Sumaktoyo, N. G., & Ruth, D. M. (2013). Jihad as justification: National survey evidence of belief in violent jihad as a mediating factor for sacred violence among Muslims in Indonesia. *Asian Journal of Social Psychology*, 16, 101-111. <https://doi.org/10.1111/ajsp.12002>
- Muntaha. (2011). JAT Siap Hadapi Isu Pembubaran! Retrieved December 29, 2014, from <http://www.ansharuttauhid.com/read/publikasi/275/jat-siap-hadapi-isu-pembubaran/#sthash.qIhXWcgX.dpuf>
- Pacey, A. (1983). *Technology: practice and culture. The*

- Culture of Technology*. Massachusetts: MIT Press.
- Reisigl, M., & Wodak, R. (2009). The discourse-historical approach (DHA). In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis* (2nd ed., pp. 95–129). London: SAGE Publication Inc.
- Silberman, I. (2004). Religion as a meaning system: Implications for pastoral care and guidance. In D. Herl M & L. Berman (Eds.), *Building bridges over troubled waters: Enhancing pastoral care and guidance* (pp. 51–67). Lima, OH: Wyndham Hall Press.
- Silberman, I. (2005a). Religion as a meaning-system: Implications for the new millennium. *Journal of Social Issues*, 61(4).
- Silberman, I. (2005b). Religion as a meaning system: Implications for individual and societal well-being. *Psychology of Religion Newsletter: American Psychological Association Division*, 36(30 (2)), 1–9.
- Silberman, I. (2005c). Religious violence, terrorism, and peace. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), *Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality* (1st ed., pp. 529–549). New York: The Guilford Press.
- Spalek, B. (2014). Community Engagement for Counterterrorism in Britain: An Exploration of the Role of “Connectors” in Countering Takfiri Jihadist Terrorism. *Studies in Conflict and Terrorism*. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.941436>
- Taher, T. (1998). *Radikalisme Agama* (1st ed.). Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), IAIN Jakarta.
- Tomsa, D. (2016). *The Jakarta Terror Attack and its Implications for Indonesian and Regional Security*. Singapura.
- Van Dijk, T. A. (1997). Critical discourse analysis: new possibilities for scientific research in the mental health area. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 17, 126–32. <https://doi.org/10.1111/b.9780631205968.2003.00019.x>
- Van Dijk, T. A. (2007). Discourse & Communication. *Communication*, 1, 2005–2008. <https://doi.org/10.1177/1750481306072182>
- Vološinov, V.-N. (1973). *Marksizm i filosofija Jazyka / Marxism and the Philosophy of Language*. (L. Matejka & I. . Titunik, Eds.). New York & London: Seminar Press, Inc.